

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
<i>ABSTRACT</i>	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	12
1.3 Identifikasi Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI	
2.1 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan	15
2.1.1 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	15
2.1.2 Fungsi Pemerintahan	17
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan	17
2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	23
2.2.2 Tipologi Kebijakan Publik	25
2.3 Hukum Ketenagakerjaan	27
2.3.1 Sumber Hukum Ketenagakerjaan	28
2.3.2 Subjek dan Objek Hukum Ketenagakerjaan	29
2.3.3 Pihak-pihak dalam perjanjian Ketenagakerjaan	30
2.3.4 Hubungan Industrial Pancasila	31
2.3.5 Ciri-ciri Hubungan Industrial	32

2.3.6 Mediasi Hubungan Industrial	33
2.4 Kerangka Berpikir	33
2.5 Proposisi	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	46
3.2 Metode Penelitian	46
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	47
3.3.1 Sumber Data	47
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	48
3.3.3 Triangulasi	50
3.4 Unit Analisis Data	52
3.5 Instrumen Penelitian	52
3.6 Teknis Analisis Data	52
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat	57
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Bandung Barat	57
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat	59
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat	61
4.1.4 Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat	65
4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat tercantum	101
4.2 Pembahasan	104
4.2.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam proses Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Bandung Barat	105
4.2.2 Faktor-faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Proses Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Bandung Barat	124
4.2.3 Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat Dalam Pelaksanaan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	130

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	132
5.2 Saran	135
5.2.1 Saran Praktis	135
5.2.1 Saran Akademis	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mediasi Perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja Tahun 2017	11
Tabel 3.1 Tabel Operasional Parameter Penelitian	55
Tabel 4.1 Jumlah Perusahaan Berdasarkan Kriteria Tenaga Kerja Tahun 2016	61
Tabel 4.2 Jumlah Pekerja/Buruh, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Kepesertaan BPJS Kesehatan	62
Tabel 4.3 Jumlah Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat	63
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh	63
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Syarat Kerja	64
Tabel 4.6 Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Implementasi Sebagai Delivery Mechanism Policy Output	17
Gambar 2.2 Model Paradigma Penelitian	45
Gambar 3.1 Macam-macam Teknik Pengumpulan Data	48
Gambar 3.2 Triangulasi “teknik” pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama)	51
Gambar 3.3 Triangulasi “sumber” pengumpulan data. (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A, B, C)	51
Gambar 3.4 Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>)	53
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bandung Barat	58
Gambar 4.2 Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat	59
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat	101
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Bidang HI – SYAKER	102
Gambar 4.5 Alur Proses Mediasi	112
Gambar 4.6 Suasana Sidang Mediasi	117

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN IZIN PENELITIAN	138
LAMPIRAN KESBANGPOL	139
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	140
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP	141